

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi pada Triwulan I Tahun 2026 di Kabupaten Demak menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, seiring dengan pengaruh faktor musiman, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Sebagai daerah yang belum termasuk dalam kota Indeks Harga Konsumen (IHK), kondisi inflasi Kabupaten Demak mengacu pada perkembangan inflasi Kota Semarang sebagai wilayah representatif terdekat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 3,29% pada Januari, meningkat menjadi 4,65% pada Februari, dan kembali menurun menjadi 3,57% pada Maret. Kenaikan inflasi pada bulan Februari dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan, sementara penurunan pada bulan Maret mencerminkan mulai efektifnya berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama TPID.

Dari sisi kelompok pengeluaran, tekanan inflasi pada Triwulan I 2026 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan memiliki bobot besar dalam struktur konsumsi. Sementara itu, kelompok perumahan dan energi mengalami tekanan cukup tinggi akibat penyesuaian tarif listrik dan komponen energi lainnya. Kelompok perawatan pribadi dan jasa juga mengalami peningkatan seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat menjelang HBKN.

Selain itu, perkembangan inflasi juga dipengaruhi oleh pergerakan harga pada sektor jasa, seperti jasa transportasi, restoran, dan layanan lainnya yang mengalami peningkatan permintaan pada periode menjelang hari besar keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi tidak hanya bersumber dari komoditas pangan, tetapi juga dari sektor non-pangan.

Dari sisi perkembangan harga di tingkat daerah, berdasarkan hasil pemantauan harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat selama bulan Maret 2026, secara umum harga komoditas strategis di Kabupaten Demak berada dalam kondisi relatif stabil. Komoditas utama seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng tidak mengalami perubahan harga yang signifikan sepanjang bulan. Harga beras premium berada pada kisaran Rp14.800/kg dan beras medium Rp13.000/kg, sementara gula pasir bertahan pada kisaran Rp18.000/kg. Minyak goreng curah dan kemasan masing-masing berada pada kisaran Rp17.000/liter dan Rp21.000/liter.

Pada kelompok protein hewani, harga juga relatif stabil. Daging sapi berada pada kisaran Rp119.000–Rp130.000/kg tanpa perubahan yang signifikan, sedangkan daging ayam ras mengalami sedikit fluktuasi dengan kecenderungan menurun di akhir bulan. Harga telur ayam ras relatif stabil di kisaran Rp30.000/kg. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan komoditas protein hewani dalam kondisi cukup aman.

Namun demikian, pada kelompok hortikultura, khususnya komoditas cabai, terjadi fluktuasi harga yang cukup signifikan. Harga cabai merah dan cabai rawit mengalami kenaikan pada pertengahan bulan sebelum kembali stabil di akhir bulan. Hal ini menunjukkan bahwa

komoditas hortikultura masih menjadi sumber utama volatilitas harga, yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, musim panen, serta kelancaran distribusi.

Sementara itu, komoditas lain seperti bawang merah dan bawang putih relatif stabil, masing-masing pada kisaran Rp40.000/kg dan Rp35.000/kg. Komoditas pangan lainnya seperti tepung terigu, kedelai, ikan, garam, dan mie instan juga menunjukkan stabilitas harga tanpa fluktuasi berarti. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi pada Triwulan I Tahun 2026 tidak bersifat menyeluruh (broad-based), melainkan lebih terkonsentrasi pada komoditas tertentu.

Secara umum, stabilitas harga di Kabupaten Demak pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang cukup terjaga. Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, tidak terjadi gangguan yang signifikan. Selain itu, berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Risiko ke Depan

Meskipun kondisi inflasi relatif terkendali, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai ke depan, antara lain:

1. Ketergantungan pasokan dari luar daerah, khususnya untuk komoditas hortikultura, yang menyebabkan rentan terhadap gangguan distribusi;
2. Faktor cuaca dan musim tanam yang dapat mempengaruhi produksi dan ketersediaan pangan;
3. Potensi gangguan distribusi, baik akibat kondisi infrastruktur maupun kepadatan lalu lintas pada jalur utama;
4. Fluktuasi harga energi, termasuk BBM dan LPG, yang dapat berdampak pada biaya produksi dan distribusi;
5. Peningkatan permintaan musiman, terutama pada periode hari besar keagamaan maupun momentum tertentu lainnya;
6. Volatilitas harga komoditas strategis, khususnya cabai dan daging ayam, yang secara historis sering menjadi penyumbang inflasi

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, diperlukan langkah antisipatif dan koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Demak secara berkelanjutan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam pelaksanaan pengendalian inflasi pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan utama di Kabupaten Demak, antara lain :

1. Keterbatasan produksi komoditas pangan strategis, khususnya komoditas hortikultura seperti cabai. Produksi lokal pada periode Januari-Februari relatif terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Demak masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain, sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga.
2. Lonjakan permintaan masyarakat pada periode HBKN. Peningkatan konsumsi yang terjadi secara serentak pada hampir seluruh komoditas pangan menyebabkan tekanan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini merupakan fenomena tahunan yang

memerlukan penanganan khusus melalui kebijakan yang bersifat antisipatif.

3. Berkaitan dengan distribusi dan infrastruktur logistik. Meskipun telah dilakukan upaya perbaikan dan rehabilitasi jalan, masih terdapat beberapa ruas yang dalam proses pengerjaan sehingga berpotensi menghambat kelancaran distribusi barang. Selain itu, potensi kemacetan pada jalur utama, khususnya jalur Pantura, juga menjadi faktor risiko dalam distribusi pangan.
4. Fluktuasi harga komoditas yang tinggi, terutama pada komoditas hortikultura. Harga cabai dan bawang cenderung sangat sensitif terhadap perubahan pasokan dan kondisi cuaca, sehingga sulit dikendalikan secara stabil.
5. Keterbatasan sistem informasi harga yang terintegrasi dan real-time. Meskipun pemantauan harga telah dilakukan secara rutin, namun sistem early warning belum sepenuhnya optimal dalam memberikan peringatan dini terhadap potensi gejolak harga.
6. Pengawasan pasar yang belum optimal sepenuhnya. Masih terdapat potensi praktik spekulasi harga maupun distribusi yang tidak efisien yang dapat memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, Pemerintah Kabupaten Demak melalui TPID telah melaksanakan berbagai kebijakan yang mencakup aspek ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif (4K).

1. Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai intervensi pasar, antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, serta pasar murah dengan pemberian subsidi harga hingga sekitar 30 persen. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan gejolak harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
2. Pada aspek ketersediaan pasokan, dilakukan upaya penguatan stok pangan strategis. Stok beras yang dikelola oleh BULOG tercatat dalam kondisi aman dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat untuk beberapa bulan ke depan. Selain itu, cadangan pangan pemerintah daerah juga tersedia sebagai buffer stock dalam menghadapi potensi gejolak harga.
3. Pada aspek kelancaran distribusi, pemerintah daerah telah melakukan rehabilitasi infrastruktur jalan pada beberapa ruas strategis yang menjadi jalur distribusi barang. Selain itu, dilakukan pengujian kelayakan kendaraan angkutan barang melalui uji KIR guna memastikan kelancaran distribusi logistik.
4. Pada aspek pemantauan dan pengawasan, TPID secara rutin melakukan monitoring harga di pasar-pasar tradisional maupun modern. Kegiatan sidak pasar juga dilakukan secara berkala untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang.
5. Pada aspek komunikasi efektif, pemerintah daerah telah melakukan publikasi harga bahan pokok secara rutin melalui media sosial sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat.
6. Selain itu, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, dilakukan monitoring terhadap pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) serta pembentukan posko pengaduan THR untuk memastikan hak pekerja terpenuhi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan I Tahun 2026, secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan berjalan cukup efektif.

Hal ini tercermin dari kondisi inflasi yang kembali menurun pada bulan Maret setelah mengalami kenaikan pada bulan Februari. Penurunan ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh TPID mampu menahan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga.

1. Dari sisi ketersediaan, bahan kebutuhan pokok relatif dalam kondisi aman dan tidak terjadi kelangkaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pasokan dan koordinasi dengan berbagai pihak berjalan dengan baik.
2. Dari sisi distribusi, meskipun terdapat beberapa kendala terkait infrastruktur, namun secara umum distribusi barang dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap pasokan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain:

1. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah yang masih cukup tinggi
 2. Fluktuasi harga komoditas hortikultura yang belum sepenuhnya terkendali
 3. Sistem informasi harga yang perlu ditingkatkan
 4. Intervensi pasar yang perlu diperluas cakupannya
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi ke depan, disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan produksi pangan lokal melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas komoditas strategis, khususnya cabai dan bawang;
2. Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan dan mengurangi ketergantungan pada daerah tertentu;
3. Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur distribusi guna mendukung kelancaran arus barang;
4. Optimalisasi pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah secara lebih masif dan merata;
5. Penguatan sistem informasi harga berbasis digital dan real-time untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat;
6. Peningkatan intensitas koordinasi TPID, khususnya pada periode rawan inflasi;
7. Penguatan perlindungan daya beli masyarakat, melalui bantuan pangan dan pengawasan harga;
8. Peningkatan pengawasan pasar untuk mencegah praktik spekulasi harga.